

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah golput pertama kalinya sejak tahun 1971 masih terus menunjukkan skala pemilu. Pengaruh golput semakin berkembang. Arbi Sanit mengatakan bahwa golput sebagai besar terisolasi secara umum, terutama di antara masyarakat yang kritik terhadap pemerintahan secara khusus, tetapi golput telah bersatu menjadi berbagai gerakan untuk memperbaiki dan mencari alternatif. Menyempurnakan sistem politik Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi universal.

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia memilih Presiden. Pada tahun ini rakyat Indonesia mendapat kesempatan untuk memilih secara langsung sesuai berdasarkan amandemen pasal 1 (Ayat 2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan atas Undang-Undang.” Kedaulatan atas kehendak dan hak politik mereka sendiri. Sejarah baru tahun 2004 bagi bangsa Indonesia mencapai prestasi besar dalam demokrasi. Pemilu 2004 masyarakat diberikan hak kebebasan berpartisipasi dalam politik, berbeda dengan tahun 1970-an ketika pemilu dianggap kurang demokratis. Jadi, masuk akal jika ada masyarakat yang tidak menyalurkan aspirasi politiknya karena kekecewaan terhadap pemerintah saat itu atau sistem pemilu yang tidak jujur, adil dan selalu berhaluan ke partai Golkar. Namun setelah runtuhnya Orde Baru, partai politik muncul sebagai wadah untuk menggalang dan mengartikulasikan kepentingan rakyat, agar rakyat dapat memilih secara bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Fenomena yang diamati justru sebaliknya partisipasi masyarakat justru menurun pada pemilu 2004, meski juga paling rendah dibanding pemilu sebelumnya.

Partisipasi masyarakat secara nasional dalam pemilu dari periode ke periode terjadi penurunan. Data menunjukkan pada penyelenggaraan pemilu dari periode tahun 2004 ke tahun 2019, angka golput relative tinggi. Ini terlihat dalam data berikut:

Table 1.1. Jumlah Golput Pada Pemilu 2004 – 2019

Periode Pemilu Tahunan	Daftar Pemilih Tetap	Persen Golput
2004	29.955.275	20,24%
2009	43.141.765	25,19%
2014	58.609.922	30,22 %
2019	34.756.541	18,03%

Sumber: data Indonesia.co

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, pemilu tahun 2004 jumlah golputnya mencapai 20,24%. Jumlah pada tahun 2009 mencapai 25,19%. Pada Pemilu 2014, angka golput mencapai 58,61 juta atau 30,22%. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa angka tertinggi golput terjadi dalam pemilu tahun 2009 dan 2014. Pada pemilu 2019 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput mencapai 34,75 juta, angka tersebut setara 192,77 juta orang atau 18,02% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Jumlah pemilih yang golput pada pemilu 2019 menurun 40,69% dibandingkan periode sebelumnya.

Selanjutnya data golput di Jawa Timur, menurut Data Indonesia.Id menunjukkan sebagai berikut:

Table 1. 2 Jumlah Golput Jawa Timur

Periode pemilu	Daftar Pemilu Tetap	Persen golput
2019	31.532.114	17,21%

Sumber: data Indonesia.co

Berdasarkan data diatas jumlah Daftar Pemilu Tetap (DPT) keseluruhan Jawa Timur 31.532.114 jiwa. Jumlah pemilih golput pada pemilu 2019 keseluruhan mencapai 17,21 % atau setara 5,4 juta jiwa. Jawa timur menduduki ke tiga dari enam provinsi yaitu pertama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, Lampung.

Data menunjukkan angka tertinggi dan rendahnya Golput pada daerah Jawa Timur di tiga kota yaitu Gresik , Lomongan dan Banyuwangi. Berdasarkan data kota Gresik menurut Antara Jatim. Angka golput di Kabupaten Gresik hasil

penghitungan suara Gubernur Jawa Timur sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, menyebutkan bahwa dari 868.495 daftar pemilih tetap, 478.867 atau 55,12 persen menggunakan pilihannya, sedangkan 389.628 atau 44,86 persen golput.

Data kota Lamongan Daftar Pemilih Tetap berjumlah 1.049.404 jiwa dengan laki-laki 518.451 orang dan perempuan 530.953 orang. Menurut perhitungan resmi, KPU Lamongan memperoleh 334.269 suara atau 55,97 persen, 263.005 suara atau 44,03 persen, dan 12.874 suara atau 2,11 persen suara tidak sah. Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih atau abstain sebanyak 424.699 atau 41,09 persen.

Banyuwangi memiliki 25 kecamatan yang masing-masing memiliki hak suara dalam pemilihan dan sebagai Daftar Pemilih Tetap. 25 kecamatan yang mempunyai hak suara terdiri laki-laki sebanyak 485.327 suara dan perempuan 517.081 suara, jumlah keseluruhannya 1.002.408. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.345.782 dari laki-laki terdapat 666.659 orang dan perempuan 679.123 orang. Berikut tabel yang mencakup data jumlah DPT dan hasil golput di Banyuwangi.

Tabel ini juga menunjukkan angka golput di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kecenderungan rendah.

Table 1. 3 jumlah DPT dan golput Kab Banyuwangi

Jumlah DPT dan golput pada Kabupaten Banyuwangi

Periode pemilu	Daftar Pemilih Tetap	Persen golput
2019	1.345.782	25,51%

Sumber: KPU Banyuwangi

Pelaksana pemilu 2019 di Banyuwangi partisipasi cukup tinggi mencapai 75,5 persen dari penduduk yang sudah terdaftar DPT, sebelumnya angka ini dibandingkan oleh pemilu-pemilu sebelumnya dalam pilpers 2014 sebesar 71 persen. Pelaksanaan pemilihan legislatif pada tanggal 9 April 2014, mencapai 68,10 persen. KPU Banyuwangi menekan angka golput hingga 31 persen pada tahun 2014. Tingkat pemilih pada pemilu tahun 2019 di Angka golput mencapai

25,51 persen, lebih berkurang dari angka golput tahun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berprestasi dalam menekan angka golput hingga pada pilpres 2019 di kota Banyuwangi tingkat masyarakat pada hak suara sudah membaik tapi masih banyak juga yang melakukan tindakan golput. Sudah menjadi tugas KPU bagaimana untuk menurunkan angka golput lagi dan memakai strategi mana lagi agar angka golput semakin menurun dan masyarakat luar akan sadar atas hak suaranya dalam memilih.

Berdasarkan latar belakang diatas yang diharapkan peneliti nantinya pada pemilu berikutnya, baik itu pemilu legislatif dan presiden bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan apapun yang menimbulkan terjadinya konflik pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Disamping itu, peneliti akan berfokus mencari bagaimana Strategi KPU dalam menekan angka golput di Kabupaten Banyuwangi pada pemilu 2024 ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Dalam Meminimalisir Golput Pada Pemilihan Umum Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk memberikan gambaran tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Dalam Meminimalisir Golput Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara Praktis manfaat hasil penelitian ini memberi gambaran informasi dan pengetahuan mengenai strategi KPU dalam meminimalisir golput di Kabupaten Banyuwangi pada pemilu tahun 2024. Penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan solusi terkait terjadinya golput dan pada pemilu di Kabupaten Banyuwangi.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai kajian politik dalam pemilu, khususnya yang berkaitan dengan teori / pendekatan strategi KPU meminimalisir golput pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi.

